

# EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 22 SURABAYA TAHUN 2018

**Dewi Widayanti**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[dewiwidayanti17@gmail.com](mailto:dewiwidayanti17@gmail.com)

**Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[wenirosdiana@unesa.ac.id](mailto:wenirosdiana@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah gerbang awal bagi siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dengan mekanisme seleksi tertentu oleh satuan Pendidikan. Pelaksanaan PPDB di SMAN 22 Surabaya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, PK-PLK Nomor 420/2789/101.7.1/2018. Pelaksanaan PPDB mulai tahun 2017 lalu telah mengalami perubahan mulai dari peraturan hingga mekanisme yaitu mulai diterapkan pembagian 5 (lima) jalur pendaftaran dan sistem zonasi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 22 Surabaya Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian Evaluasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 22 Surabaya Tahun 2018 secara umum telah cukup berhasil dilaksanakan sesuai dengan pedoman petunjuk teknis PPDB, meskipun masih terdapat beberapa masalah yang terjadi. Dari kriteria efektivitas, pelaksanaan PPDB melalui jalur mitra warga memiliki peminat yang sangat sedikit sehingga tidak berhasil terpenuhi kuotanya. Pada kriteria Efisiensi terjadi inefisiensi terhadap sumber daya manusia yang digunakan karena jumlah panitia PPDB SMAN 22 Surabaya sebanyak 48 orang yang mana jumlah ini dinilai terlalu banyak apabila dibandingkan dengan sekolah lain yang jumlahnya hanya 30 orang. Untuk kriteria pemerataan hanya terjadi masalah pada jalur mitra warga saja yang belum terpenuhi namun bisa diatasi dengan cara mengalihkan sisa kuota mitra warga ke jalur reguler. Untuk kriteria Responsivitas menghasilkan berbagai pendapat dari wali murid dan siswa yang mayoritas mendukung adanya PPDB dengan aturan baru, namun beberapa juga masih menganggap bahwa PPDB dengan aturan baru telah membatasi anak mereka untuk memilih sekolah. Pada kriteria Ketepatan, PPDB pada SMAN 22 Surabaya ini dinilai sudah tepat karena sebagai SMA pinggiran, SMAN 22 Surabaya telah menerima banyak manfaat dari PPDB, begitu pula dengan Wali murid yang juga merasakan manfaat adanya PPDB ini yaitu menghemat waktu dan biaya transportasi ke sekolah dan dapat memantau pergaulan anak.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru

## **Abstract**

New Student Admission (PPDB) is the starting gate for students who want to continue their education to a higher level with a specific selection mechanism by the Education unit. The implementation of PPDB at SMAN 22 Surabaya is guided by the Technical Guidelines for the Implementation of PPDB in SMA, SMK, PK-PLK Number 420/2789 / 101.7.1 / 2018. The implementation of PPDB since 2017 has undergone a change from regulations to mechanisms, namely the implementation of the distribution of 5 (five) registration lines and zoning systems. The purpose of this study was to describe the Evaluation of New Student Admission Policy (PPDB) at SMAN 22 Surabaya in 2018. This study used a descriptive type of research with a qualitative approach. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. Results of the study Policy evaluation of New Student Admission at SMAN 22 Surabaya in 2018 has generally been quite successful in accordance with the PPDB technical guidance guidelines, although there are still a number of problems that occur. From the effectiveness criteria, the implementation of PPDB through the partner partners' path has very little interest so that the quota cannot be fulfilled. In the Efficiency criteria there were inefficiencies in the human resources used because the number of PPDB SMAN 22 Surabaya committees was 48 people, of which this number was considered too much when compared to other schools with only 30 people. For the even distribution criteria, only problems occur in the path of the citizen partners that have not been fulfilled, but can be overcome by transferring the remaining quota of citizen partners to the regular path. For the criteria of responsiveness to produce a variety of opinions from guardians of students and students, the majority support the existence of PPDB with new rules, but some still consider that PPDB with new rules has limited their children to choose schools. In the criteria of Accuracy, PPDB at SMAN 22 Surabaya was considered

appropriate because as a high school senior high school, SMAN 22 Surabaya had received many benefits from PPDB, as was the case with Wali students who also benefited from the PPDB which was saving time and transportation costs to schools and being able to monitor child interaction.

Keywords: Evaluation, Policy, New Student Admission

Kepegawaian	Kepegawaian, Plagiasi oleh oknum di PTN/PTS
-------------	---

Sumber : ombudsman.go.id

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan tiang dan pondasi dasar yang utama dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan pemerataan pendidikan agar setiap anak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Namun sayangnya meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyamaratakan pendidikan di Indonesia, tetap saja terjadi masalah di dunia pendidikan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan tingkat urgensi dari masalah pendidikan yang ada di Indonesia.

**Tabel 1**

### **Jenis Laporan Yang Masuk di Ombudsman RI Berdasarkan Bidang Permasalahan Tahun 2018**

<b>Bidang</b>	<b>Jenis Laporan</b>
<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>PPDB, Ujian Nasional</b>
Bidang Kesehatan	Layanan BPJS, Layanan Rumah Sakit, Kasus Vaksin Palsu
Bidang Penegakan Hukum	Putusan Pengadilan, Putusan Perkara, Layanan Penegakan Hukum, Pelanggaran HAM masa lalu
Bidang Ketenagakerjaan	Gugatan terhadap Disnaker Prov/Kab/Kota dalam melakukan mediasi
Bidang Pertanahan	Konflik Agraria, Ganti rugi tanah untuk kepentingan publik, Sengketa Pulau Pari, Perizinan Pulau Reklamasi, Penataan Kawasan
Bidang Perizinan	Perizinan Usaha
Bidang	Seleksi CPNS, Status

Berdasarkan data dari Ombudsman RI Tahun 2018 menyatakan bahwa Bidang Pendidikan merupakan masalah yang paling sering dilaporkan masyarakat, dengan jenis laporan terkait masalah PPDB. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMA, SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat, saat ini pelaksanaan PPDB telah berubah menjadi 5 (lima) jalur pendaftaran dengan karakteristik pembagian zona. Kelima Jalur tersebut diantara adalah :

1. Jalur Prestasi yang diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi akademis dan non akademis
2. Jalur Mitra Warga yang diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga kalangan miskin atau prasejahtera
3. Jalur Bidik Misi yang diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang bersal dari kalangan keluarga miskin dan mempunyai prestasi akademis yang dibuktikan dengan nilai Ujian Nasional
4. Jalur Inklusif yang diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang mengalami hambatan berat yaitu berkebutuhan khusus
5. Jalur Reguler yaitu calon peserta didik yang akan melakukan pendaftaran secara mandiri dan melalui jaringan online ke sekolah SMA/SMK Negeri

Penerapan PPDB untuk jenjang menengah atas di atur secara terperinci dalam Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK dan PK-PLK Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : 420/2789/101.7 /2018, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang iptek, olahraga, seni budaya dan kepramukaan.
4. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus dan inklusif.

Namun sebagian wali murid masih beranggapan bahwa pelaksanaan PPDB selama ini dinilai tidak adil bagi siswa karena terdapat pembatasan wilayah-wilayah tertentu dalam memilih sekolah. Berikut merupakan petikan wawancara dengan Ibu Darsih (43 tahun) yang anaknya diterima di SMA 22 Surabaya :

“Menurut saya tidak adil yaa mbak, karena anak-anak kan sebenarnya dipaksa untuk milih sekolah yang dekat sama rumah, harusnya anak-anak punya hak kan untuk memilih sekolah yang mereka mau, tapi karena PPDBnya sudah berubah mau gak mau harus pilih sekolah yang dekat” (Wawancara pada Sabtu 24 November 2018).

Senada dengan yang disampaikan Ibu Darsih, Lutfiana (15 tahun) yang merupakan siswa yang lulus PPDB juga mengungkapkan pendapatnya terkait PPDB. Berikut merupakan petikan wawancara dengan Lutfiana :

“Maunya sekolah yang bagus yaa mbak kayak SMA komplek tapi ya gimana pas SMP sudah dibilangi kalo mau lulus PPDB sebaiknya pilih sekolah yang dekat sama rumah, jadinya saya pilih SMA 22” (Wawancara pada Sabtu 24 November 2018).

SMAN 22 Surabaya merupakan salah satu sekolah pinggiran yang secara tidak langsung sangat diuntungkan dengan diterapkannya PPDB sistem zona ini. Sebagai satu-satunya SMA negeri di Kecamatan Wiyung, SMAN 22 Surabaya memiliki dominasi yang cukup kuat untuk menarik calon pendaftar yang cukup banyak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan PPDB di SMAN 22 Surabaya dianalisis menggunakan teori dari William N. Dunn tentang evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas serta ketepatan. Pemilihan teori evaluasi ini diharapkan mampu mendeskripsikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PPDB di SMAN 22 Surabaya. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 22 Surabaya Tahun 2018”**.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui

pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:8) menyebutkan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting*. Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan bila penelitian ingin mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan (Suyanto dan Sutinah, 2011:174). Pendapat Moleong (2000:62) mengatakan bahwa penetapan fokus dapat membatasi studi yang berarti dengan adanya fokus dan tempat penelitian menjadi lebih layak. Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 22 yang dianalisis menggunakan teori indikator evaluasi William N. Dunn (2003) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan memiliki 6 (enam) indikator yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Subyek dalam penelitian ini adalah Ibu Risma selaku Kepala Sie Pendidikan SM, SMK, PK-PLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kota Surabaya, Bapak Karyanto selaku Kepala Sekolah SMAN 22 Surabaya, Bapak Wawan selaku Ketua Panitia PPDB SMAN 22 Surabaya serta Para Wali Murid dan Siswa Kelas X SMAN 22 Surabaya. Lokasi penelitian adalah di SMAN 22 Surabaya yang terletak di jalan Balas klumprik Nomor 22 Wiyung Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas

Menurut pendapat Makmur (2011:7-9) Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. Tujuan PPDB secara terperinci dijelaskan pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB SMA, SMK, PK-PLK Negeri Nomor 420/2789/101.7.1/2018. Di dalam petunjuk teknis tersebut telah dijelaskan mengenai tujuan, mekanisme, pagu, serta kuota masing-masing jalur pendaftaran. Penentuan efektivitas suatu kebijakan bisa dilihat dari pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan oleh pelaku kebijakan, begitu pula dengan kebijakan PPDB di SMAN 22 Surabaya yang memiliki capaian terhadap tujuannya sebagai berikut:

- a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah memperoleh layanan

pendidikan yang sebaik-baiknya. Pada tujuan yang pertama ini, PPDB dimaksudkan sebagai salah satu layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi seluruh anak yang berusia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Sebagai gerbang awal bagi anak yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, PPDB telah dilaksanakan di seluruh sekolah termasuk SMAN 22 Surabaya, yang mana dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Petunjuk Teknis PPDB Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur.

- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Tujuan yang kedua ini telah diwujudkan dengan adanya penentuan Jalur Mitra Warga dan Bidik Misi. Kedua jalur ini memiliki keunggulan untuk membantu meringankan biaya sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Namun perbedaannya adalah jalur mitra warga diperuntukan bagi siswa yang tidak mampu dan berdomisili tidak jauh dari sekolah tujuan, sedangkan Bidik Misi bagi siswa yang memiliki prestasi akademis yang bagus dibuktikan dengan Nilai UN. Kedua jalur ini juga telah diterapkan di SMAN 22 Surabaya, namun untuk jalur mitra warga hanya terdapat 6 siswa yang mendaftar padahal kuota yang disediakan terdapat 18 siswa. Sedangkan untuk jalur bidik misi yang memiliki kuota sebanyak 11 siswa yang berhasil terpenuhi dan masing-masing siswa yang mendaftar juga telah dinyatakan lulus dari tahap seleksi dan survey tempat tinggal.
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang IPTEK, Olahraga, Seni Budaya dan Kepramukaan. Tujuan yang ketiga ini telah terwujud dengan adanya jalur Prestasi pada PPDB. Setidaknya terdapat 5% kuota dari jumlah pagu awal sekolah. Terdapat 18 siswa yang diterima melalui jalur prestasi. Jalur prestasi sendiri diperuntukan bagi siswa yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik yang dibuktikan melalui sertifikat maupun piagam yang diperoleh dari perlombaan yang diadakan secara resmi. Dalam buku pedoman pelaksanaan PPDB juga telah diatur mekanisme pemberian skor pada masing-masing tingkat kejuaraan.

- d. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif. Tujuan yang keempat ini dimaksudkan untuk jalur inklusif pada PPDB. Sayangnya jalur inklusif tidak dilaksanakan di SMAN 22 Surabaya karena pihak sekolah mengaku belum memiliki sarana dan prasarana penunjang, serta belum terdapat tenaga pengajar yang memiliki kompetensi untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus.

## 2. Efisiensi

Efisiensi menurut Mahmudi (2010) adalah proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan maka semakin efisien pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang diperlukan diantaranya sumber daya manusia, sumber daya biaya dan sumber daya waktu serta sumber daya fasilitas.

Hasil evaluasi pada kriteria efisiensi sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB di SMAN 22 Surabaya menunjukkan bahwa jumlah panitia PPDB SMAN 22 Surabaya yang berjumlah 48 orang dinilai terlalu banyak apabila dibandingkan dengan sekolah lainnya yang rata-rata hanya berjumlah 30 orang saja. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi pada sumber daya manusia yang dipakai. Apalagi jika dilihat dari beban tugasnya yang sekarang hanya menangani untuk PPDB *offline* yang kuotanya tidak terlalu banyak yaitu hanya sejumlah 35 siswa saja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah panitia PPDB terlalu banyak apabila dibanding siswa yang mendaftar.

Sedangkan efisiensi pada sumber daya biaya yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB di SMAN 22 Surabaya terlihat dari penghematan biaya untuk formulir pendaftaran yang mana karena sebagian besar sistemnya sudah *online* maka tidak perlu mnyetak banyak formulir. Wali murid juga merasakan efisiensi dari segi biaya, karena tidak perlu lagi bolak-balik ke sekolah sehingga menghemat biaya transportasi ke sekolah. Adanya aturan sistem zona ini sejati juga telah menghemat biaya transportasi ke sekolah, bagi siswa biasanya berangkat dengan jalan kaki.

Kriteria Efisiensi selanjutnya adalah pada Sumber daya waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan PPDB di SMAN 22 Surabaya. Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB, telah dilampirkan jadwal pelaksanaan PPDB. SMAN 22

Surabaya telah berhasil menyelesaikan segala tugasnya yang berkaitan dengan PPDB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Efisiensi waktu juga ditunjukkan oleh panitia PPDB dengan cara membagi tugas kepada anggota panitia agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Jumlah Panitia PPDB SMAN 22 Surabaya yang cukup banyak dapat menghemat waktu penyelesaian tugas. Wali murid juga merasa bahwa PPDB yang baru ini juga efisien dari segi waktu. Hal ini ditunjukkan dengan wali murid yang mengaku lebih bisa menggunakan waktu luangnya untuk keperluan lain seperti bekerja karena saat ini mekanismenya sudah *online* maka wali murid cukup memantau hasil PPDB melalui *website*.

Kriteria efisiensi yang terakhir adalah efisiensi sumber daya fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PPDB. Untuk PPDB *online* fasilitas yang diperlukan adalah komputer dan jaringan WiFi sedangkan untuk *offline* yang diperlukan adalah komputer, LCD, kertas, meja, kursi dan yang lainnya. Efisiensi dalam hal fasilitas ini ditunjukkan dari penggunaan komputer-komputer yang masih bisa dipakai, meskipun terdapat komputer yang dalam kondisi rusak, namun pihak sekolah lebih memilih untuk menservis kembali komputer yang rusak daripada harus membeli baru.

### **3. Kecukupan**

Pada Kriteria Kecukupan berkaitan erat dengan efektivitas output yang dihasilkan dapat mengatasi masalah yang selama ini ada. Kebijakan PPDB dengan peraturan baru hadir karena masalah terkait tidak meratanya akses layanan pendidikan yang selama ini hanya berpusat di beberapa sekolah saja yang terletak di kota. SMAN 22 Surabaya merupakan salah satu SMA pinggiran yang telah merasakan dampak positif adanya PPDB dengan aturan baru. Semenjak diterapkannya PPDB aturan baru, peminat SMAN 22 Surabaya menjadi lebih banyak, hal ini dikarenakan pendaftar diwajibkan untuk mendaftar sekolah yang letaknya tidak jauh dengan alamat rumahnya sesuai dengan Kartu Keluarga. Meskipun masalah terkait sekolah favorit berhasil terselesaikan, namun pada kenyataannya justru menimbulkan masalah baru yaitu terkait pagu yang disediakan SMAN 22 Surabaya yang tidak berhasil untuk menampung seluruh siswa lulusan SMP yang berada di Wiyung. Sebagai satu-satunya SMA negeri di Wiyung, persaingan untuk bersekolah di SMAN 22 Surabaya cukup sulit karena banyaknya siswa lulusan SMP di Kecamatan

Wiyung pada tahun 2018 yang berjumlah 1215 siswa, sedangkan pagu yang disediakan hanya 349 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 866 siswa yang tidak diterima dan harus melanjutkan ke sekolah swasta.

### **4. Pemerataan**

Kriteria pemerataan dalam kebijakan publik mempunyai arti yang sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria Pemerataan dalam PPDB SMAN 22 Surabaya dapat dilihat dari persebaran para peserta didik baru yang saat ini bukan hanya terpusat di sekolah-sekolah pusat kota saja, melainkan juga di sekolah-sekolah pinggiran seperti SMAN 22 Surabaya. Dari hasil pelaksanaan PPDB dapat diketahui bahwa SMAN 22 Surabaya berhasil memperoleh peminat prioritas sebanyak 617 pendaftar tahun 2018 dengan pagu yang disediakan sejumlah 349 pendaftar. Sedangkan sekolah-sekolah pusat kota seperti SMAN 5 Surabaya bahkan hanya memiliki 427 peminat prioritas. Sehingga saat ini PPDB tidak lagi berpusat di sekolah-sekolah yang terletak di pusat kota saja, namun juga sekolah pinggiran.

### **5. Responsivitas**

Kriteria Responsivitas pada tahap evaluasi sangat penting mengingat responsivitas merupakan tanggapan dari kelompok sasaran terkait kebijakan. Tanggapan Wali murid terkait PPDB awalnya adalah tidak setuju karena menganggap PPDB dengan aturan baru telah membatasi siswa untuk mendaftar ke sekolah favorit mereka. Namun karena terikat aturan, terdapat wali murid yang merasa terpaksa mendaftarkan anaknya ke SMAN 22 Surabaya. Sedangkan bagi wali murid dari keluarga tidak mampu merasa terbantu karena ada jalur pendaftaran bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Wali murid juga beranggapan bahwa adanya kebijakan PPDB dengan aturan baru ini dapat membantu mereka dalam memantau perilaku anak di sekolah dan pergaulannya. Selain itu wali murid juga beranggapan bahwa jarak rumah dan sekolah yang tidak terlalu jauh juga dapat menghemat biaya transportasi dari rumah ke sekolah.

### **6. Ketepatan**

Ketepatan menyatakan bahwa pemilihan alternatif kebijakan yang dipakai dapat berdampak positif maupun negatif. Apabila berdampak positif maka alternatif kebijakan yang dipilih sudah tepat, namun apabila berdampak negatif maka alternatif kebijakan yang dipilih tidak tepat dan perlu

menggunakan alternatif lain. Ketepatan dalam kebijakan PPDB di SMAN 22 Surabaya dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari pelaksanaan PPDB. Dari hasil dapat diketahui bahwa dampak adanya PPDB di SMAN 22 Surabaya secara umum adalah bernilai positif bagi sekolah karena jumlah peminat SMAN 22 Surabaya yang cukup banyak. Sedangkan bagi wali murid adanya kebijakan PPDB ini telah berdampak negatif dan positif. Persebaran siswa yang merata dengan porsi yang sama bagi semua sekolah saat ini membuat akses layanan pendidikan lebih merata tidak hanya berpusat pada beberapa sekolah saja. Kebijakan PPDB dengan aturan baru ini telah sangat bermanfaat bagi sekolah pinggiran utamanya seperti SMAN 22 Surabaya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan, analisis evaluasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 22 Surabaya tahun 2018 menggunakan teori William N. Dunn yang terdapat enam kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan. Secara umum, SMAN 22 Surabaya telah berhasil melaksanakan PPDB dengan hasil yang cukup baik apabila dilihat dari jumlah peminatnya. Pada kriteria efektivitas, sebenarnya kebijakan PPDB di SMAN 22 Surabaya telah cukup efektif meskipun untuk jalur mitra warga masih terdapat kendala karena peminatnya yang hanya sedikit dan lagi untuk jalur inklusif juga tidak berhasil dilaksanakan karena SMAN 22 Surabaya belum memiliki sarana dan prasarana. Pada kriteria efisiensi dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi sumber daya manusia, waktu dan biaya serta fasilitas. Untuk penggunaan sumber daya manusia, SMAN 22 Surabaya dinilai kurang efisien karena menggunakan panitia yang cukup banyak yaitu 48 panitia. Jika dilihat dari dimensi waktu, pelaksanaan PPDB telah ditentukan sesuai jadwal, untuk itu SMAN 22 Surabaya melakukan pembagian tugas kepada panitia PPDB agar pekerjaannya menjadi lebih cepat selesai. Sedangkan dari dimensi biaya panitia PPDB telah cukup menghemat anggaran biaya PPDB. Sedangkan efisiensi dalam hal fasilitas ditunjukkan dengan cara menggunakan komputer yang masih layak. Pada kriteria kecukupan, PPDB pada SMAN 22 Surabaya dirasa telah cukup mengatasi masalah PPDB yang selama ini ada yaitu terkait sekolah favorit, namun PPDB yang baru ini juga telah menimbulkan masalah terkait jumlah siswa lulusan

SMP dari Kecamatan Wiyung yang tidak bisa diterima semua di SMAN 22 Surabaya. Untuk kriteria Pemerataan dapat dilihat dari hasil pelaksanaan PPDB yang saat ini saat ini tidak hanya berpusat pada sekolah-sekolah pusat kota saja, melainkan juga sekolah pinggiran. Pada kriteria Responsivitas, saat ini tanggapan wali murid dan siswacukup beragam sebagaimana ada yang berpendapat positif dan ada pula yang negatif. kriteria Ketepatan Kebijakan PPDB di SMAN 22 Surabaya. Menurut SMAN 22 Surabaya, kebijakan PPDB ini telah tepat dilaksanakan di SMAN 22 Surabaya hal ini dikarenakan banyak manfaat yang dirasakan setelah adanya kebijakan PPDB. Berdasarkan berbagai pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil evaluasi kebijakan PPDB di SMAN 22 Surabaya adalah SMAN 22 Surabaya mampu melaksanakan PPDB dengan baik meskipun dalam beberapa aspek masih perlu dibenahi agar hasilnya benar-benar sesuai dengan tujuan PPDB.

### **Saran**

1. Sebaiknya sekolah mengurangi jumlah panitia PPDB offline agar tidak terjadi inefisiensi dalam hal Sumber Daya Manusia
2. Sosialisasi perlu ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi
3. Pihak sekolah perlu mengadakan promosi terkait keunggulan-keunggulan SMAN 22 Surabaya agar menarik minat calon pendaftar dan wali murid.
4. Sebaiknya SMAN 22 Surabaya segera melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk siswa yang berkebutuhan khusus.
5. Sebaiknya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kota Surabaya perlu meninjau ulang terkait pembagian zona wilayah PPDB.
6. Sebaiknya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu mengadakan sosialisasi langsung kepada Wali murid.

### **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

1. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikan skripsi ini.

2. Eva Hanya Fanida, S.AP., M.AP., selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara.
3. Prabawati, S.Sos., M.Si selaku dosen Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikan skripsi ini.
4. Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP selaku dosen Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi. Jakarta: Kencana

## DAFTAR PUSTAKA

Dunn. William.N. 1994. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan oleh Samodra Wibawa dkk. 2000. Jogjakarta : Gajah Mada University Press.

<http://www.ombudsman.go.id> (diakses pada 26 Desember 2018)

Mahmudi. 2010 Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Rafika Aditama

Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rakhmawati, Mentari Noor. 2017. Evaluasi kebijakan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Berbasis Kewilayahan di Kota Bandung Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jurnal Skripsi Universitas Pasudan

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.

Republik Indonesia. 2018. Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK dan PLK Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor 420/2789/101.7.1/ 2018. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Surabaya

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur. Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Surabaya